



Available online at website :
<http://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/index/index>
Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning

PERAN WALI NAGARI DALAM MENANGGULAGI KEMISKINAN SAAT MASA PANDEMI COVID_19 DI NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Mulia Aji¹, Dian Rizke², Sinta Westika Putri³

1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lppn

Email : dianrizke@stia-lppn.ac.id

ABSTRACT

This study uses a descriptive method, where the researcher tries to describe all phenomena, symptoms, events according to the research problem as it is. The nature of the qualitative approach is intended to present information or information that is arranged in such a way, so as to be able to provide a clear and real picture of the object of research. Based on the descriptions in the previous chapters, the authors draw the following conclusions: 1) The role of the Nagari Wali in Nagari Kunangan Parik Rantang, Sijunjung Regency, among others, is: As a policy implementer, as an implementer of programs, as a coach. 2) Poverty reduction programs during the Covid19 pandemic created by Nagari Kunangan Parik Rantang, Sijunjung Regency include: Programs to increase social protection, Programs to increase access to basic services, Programs to empower poor communities, Programs for quality and inclusive economic growth. 3) The role of Wali Nagari in Nagari Kunangan Parik Rantang, Sijunjung Regency in tackling poverty during the Covid19 pandemic is as a public regulator who can facilitate the community to develop the economy through: Regulation of access to natural resources, Regulation of access to capital, Regulation of access to market opportunities for marketing of community products. Based on the conclusions above, the authors provide the following suggestions: 1) It is necessary to increase the competence of the nagari government apparatus, both through education and training as well as through certification so that this institution is expected to work effectively and efficiently and play a more optimal role. 2) The handling of poverty should really be in touch with the poor, providing assistance according to the target, namely by name, by address. Data must be by name by address, the problem of data collection must be detailed. 3) Various poverty alleviation efforts should be continuously improved.

Keywords: *The role of the Nagari Wali, Poverty reduction programs*

I. PENDAHULUAN

Nagari merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat adat (tradisional) yang mempunyai kewenangan otonom dalam menjalankan pemerintahannya dan khusus berada di wilayah persebaran etnis minangkabau. Otonomi daerah nagari dilandasi dari sistem kebudayaan minangkabau yang berbeda bentuk adatnya dan sudah berlangsung secara turun temurun. Perbedaan tersebut berdasarkan kekhasan nagari sebagai “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community).

Nagari juga merupakan pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang biasanya terdapat di Provinsi Sumatera Barat, menurut Pemerintahan Indonesia, Nagari sama dengan Desa, yang dimana tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah, Nagari merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Wali Nagari.

Dewasa ini, nagari merupakan bentuk pembagian wilayah secara administratif yang berada di bawah kecamatan yang ada di Sumatera Barat, dan secara khusus disebutkan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul dari adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat nagari, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat nagari, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relative sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan

kepadanya.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua daerah, terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadic seolah-olah mempunyai tujuan nyata, serta substansinya hanya administratif.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lainnya yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimpangpemerataan.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan diberbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti: pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Untuk mengentaskan kemiskinan ini maka melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Selanjutnya Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010 tentang TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi diluar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of

International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 122 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel corona virus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian, Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestic, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berperan pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung memandang kemiskinan saat pandemi Covid-19 merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat masyarakat, untuk itu pemerintah kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program. Tingginya angka penduduk miskin menuntut pemerintah kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut, dan diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro di pemerintah kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung masih belum tepat sasaran dan jumlah, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, di kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung menghadapi persoalan yang cukup

kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penduduk miskin di kanagarian Kunungan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung sejak pandemi Covid-19 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Oleh karena itu koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di nagari termasuk di kanagarian Kunungan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung. Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berbenah diri.

Beberapa masalah yang perlu dibenahi diNagari Kunungan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah adanya masalah kemiskinan nagari, kesempatan kerja, sifat hubungan impersonal, intervensi kebijakan pemerintah. Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah.Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya.

Namun pada kenyataannya pada saat pandemi Covid-19 ini kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana juga terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus- menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan.Dalam arti peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

Dalam mengatasi permasalahan ini maka dituntut adanya koordinasi kebijakan yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan setiap keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,sehingga dalam pelaksanaan program, tidak mengalami benturan atau inkonsistensi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Hal ini disebabkan karena upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan.

Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan terutama saat pandemi Covid-19 adalah belum optimalnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian, dengan judul “PERAN WALI NAGARI DALAM MENANGGULAGI KEMISKINAN SAAT PANDEMI COVID19 DI NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG KABUPATEN SIJUNJUNG”.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan pada Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung, dengan waktu penelitian selama lebih kurang 2 (dua) bulan terhitung Agustus s/d September 2021.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan semua gejala ataupun peristiwa atau fenomena secara apa adanya sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data), hal ini dilakukan dengan senantiasa mengacu pada pembahasan masalah penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Moloeng (2007:3) “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sejalan dengan itu, Denzim dan Lincoln dalam Moloeng (2007:5) “mengatakan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan masalah-masalah yang bersifat aktual. Secara ringkas cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non eksperimental dan analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi (2010:64) bahwa :

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi.

Surachmad (2009:14) menyatakan bahwa :

Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam hubungan dengan riset kualitatif yang memusatkan pada deskriptif, HP Sutopo (2012:35) mengemukakan bahwa:

Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dan dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah, berisi catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data.

Yulius Slamet (2006:7) menyatakan bahwa:

Sedangkan berdasarkan tujuannya penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai sesuatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskriptifkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Interview/Wawancara

Metode interview ini merupakan suatu metode yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara atau dialog langsung dengan responden penelitian untuk mengetahui masalah yang dihadapi. Adapun alasan penulis melakukan metode ini adalah antara lain :

- a. Metode ini berguna sekali bagi penulis dalam menginterpretasikan data-data yang diperlukan atau baru diperoleh dari orang-orang yang penulistemui.
- b. Dengan menggunakan metode ini penulis merasakan adanya penghematan waktu, karena tidak memakan waktu yang lama, hal ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan

hasilnya pun bisa didapat dengan lengkap dan jelas.

- c. Metode ini paling mudah dan paling praktis sekali digunakan karena bisa menginterview langsung terhadap objek yang diteliti.
- d. Metode ini sangat berguna dalam rangka meninjau masalah yang timbul dalam interview berlangsung.

2. Observasi

Adapun penulis menggunakan metode ini adalah :

- a. Metode ini menggunakan cara untuk mengetahui dengan langsung segala macam kejadian.
- b. Metode ini akan lebih mudah menilai segala keterangan yang diperoleh dengan interview.

3. Analisa Dokumen

Teknik yang dipakai untuk memperoleh dan menganalisa data yang diperoleh guna memperkuat dan memperkaya temuan penelitian melalui wawancara dan observasi.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung, Sekretaris Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dan salah seorang tokoh masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam menganalisa data temuan penelitian ini adalah teknik data kualitatif, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan secara bertahap dimulai dengan mengumpulkan semua data informasi, mengelompokkan data sesuai dengan aspek penelitian, mengintegrasikan data dan berakhir menganalisa data dan informasi dengan cara membandingkan teori ataupun ketentuan-ketentuan yang mendasari permasalahan yang dibahas.

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang

dipergunakan penulis adalah teknik analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian secara deskriptif ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variable-variabel yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujianhipotesa.

Dalam model analisis data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus.

Adapun penjelasan dari kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, merupakan informasi baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Reduksi data, merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam field note (catatan lapangan).
3. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian argumentasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk table naratif.
4. Penarikan kesimpulan, merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang KabupatenSijunjung

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2014 dikatakan pembangun desa/nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa/nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa/nagari meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung melayani dan hidup bersama masyarakat memiliki peran yang strategis dalam menanggulangi kemiskinan diwilayahnya yaitu pelayanan (service), pembangunan

(development), dan pemberdayaan (empowerment). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2015 Presiden Republik Indonesia sudah menandatangani pengesahan undang-undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini sempat menimbulkan gejolak di Sumatera Barat ketika undang-undang ini disusun, bahkan setelah disahkan. Undang-undang ini dianggap bertabrakan dengan prinsip “kembali ke nagari” yang ada di Sumatera Barat.

Dengan membaca Undang-Undang No. 6 tahun 2014 ini dengan seksama, masalah itu sudah teratasi. Sebab, desa dalam pengertian undang-undang ini adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Artinya, nagari tetap mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang, sesuai dengan asal usulnya. Nagari adalah bagian dari desa adat atau bisa jadi dijadikan sebagai desa resmi. Perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 pada orde baru bukan hanya pergantian nama Nagari menjadi desa.

Saat itu Nagari yang berjumlah 543 di Sumatera Barat diubah menjadi 3.138 desa. Perubahan menjadi desa yang demikian maksudnya agar memperoleh dana bantuan pembangunan desa (Bangdes) yang lebih banyak dari pemerintah pusat. Tetapi sekarang dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ini, Provinsi Sumatera Barat tetap mendapatkan Alokasi Dana Desa yang lebih banyak dari pemerintah pusat. Semenjak dilaksanakannya kebijakan Babaliak Banagari, banyak perkembangan yang dialami oleh nagari itu sendiri.

Peran Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah :

a. Sebagai Pelaksana Kebijakan

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dengan perangkat lembaga nagari berupa penyusunan rencana pembangunan yang menghasilkan sebuah kebijakan.

Di dalam Pemerintahan Nagari, Wali Nagari beserta perangkat lembaga nagari bekerjasama dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu hidup masyarakat desa sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih maju, sejahtera dan mandiri.

Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mengaktifkan kelembagaan UPK.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia(SDM).
4. Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Sebagai PelaksanaProgram-Program

Dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu menekankan pendekatan dari bawah (bottom up approach).dengan adanya pendekatan dari bawah maka Pemerintah Kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dapat membuka kesempatan kepada masyarakat

Kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung untuk terlibat dalam menggali gagasan, sehingga program-program tersebut dapat dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah nagari hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

Bahwa Pemerintah Kanagarian Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung sebelum membuat program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat jorong yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu jorong, kemudian dilanjutkan ke musyawarah nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT/RW, LPMD, BPN serta Pemerintah Nagari.

c. Sebagai Pembina

Wali Nagari Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat Nagari Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya dan dapat meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari yang dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidakterjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah danterpinggirkan.

Pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung secara garis besar mencakup berbagai bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bidang ekonomi.

Dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan penyuluhan tentang sistem pola tanam padi, pemilihan bibit, penggunaan teknologi modern seperti mesin perontok padi serta perbaikan irigasi. Sebelum diadakan penyuluhan-penyuluhan dari dinas pertanian masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung sering mengalami masalah dalam memberantas hama serta polatanam.

Penyuluhan yang diberikan dinas pertanian sangat bermanfaat bagi para petani Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung selain dapat menambah pengetahuan tentang pola tanam yang baik serta pemilihan bibit padi yang baik, petani Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung juga diberikan bantuan murah melaluigapoktan, dalam hal ini petani yang ada di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diberi kemudahan dalam hal permodalan melalui dana perkreditan rakyat yang dikelola oleh UPK Amanah yang ada di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung sehingga petani bisa dengan mudah memperoleh modal dan cicilan dalam pembelian pupuk maupun obat-obat pertanian.

Selain melakukan penyuluhan Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang juga membuat kelompok tani guna untuk menyerap hasil tani seperti buah-buahan dan sayuran karena adanya pembatasan berkerumun dan memfasilitasi penjualan hasil ternak.

2. Pembinaan dalam bidang kesehatan

ada beberapa kegiatan yang dilakukan selama pandemi covid19, antara lain :

- a. Mensosialisasikan vaksinansi kepada masyarakat
- b. Memfasilitasi dinas kesehatan setempat untuk melakukan vaksinasi 1, 2 dan 3
- c. Memastikan masyarakat telah melakukan vaksinansi
- d. Menyediakan ruang isolasi dan memenuhi kebutuhan pasien selama diisolasi.

3. Pembinaan dalam bidang keagamaan

Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung bersama perangkat nagari melakukan pembinaan kepada masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung melalui kegiatan- kegiatan rutin seperti jamaah tahlil, jamaah khataman, jamaah yasinan.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung mendapatkan siraman rohani

serta bisa mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga, selain itu juga pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung akan dengan mudah untuk membina serta mengkoordinir kegiatan keagamaan.

4. Pembinaan dalam bidang kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba dimana kegiatan sosialisasi tersebut Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Sijunjung.

Dengan adanya sosialisasi pembinaan kepemudaan tersebut masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung bisa lebih berhati-hati, mencegah serta bisa memberantas penyalagunaan narkoba yang ada di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

5. Pembinaan dalam bidang pendidikan

Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung melakukan pembinaan dibidang pendidikan dengan peningkatan sarana pendidikan salah satunya penambahan lokal (kelas) PAUD Al-Hikmah, selain itu Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dalam mensukseskan program belajar 9 tahun memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam proses pengurusan surat-surat keterangan tidak mampu agar masyarakat tersebut bisa lebih semangat dalam menyekolahkan anaknya, akan tetapi jika masyarakat tersebut tergolong menengah keatas pemerintah desa memunggut biaya sebesar Rp.5.000.

6. Pembinaan dalam bidang keamanan

Pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pembinaan masyarakat dalam bidang keamanan terbukti dengan diadakannya kegiatan siskamling setiap hari, dimana setiap KK (Kepala Keluarga) mendapat giliran 1 (satu) kali dalam seminggu, apabila ada salah satu warga yang tidak bisa hadir maka mereka akan menggati dihari berikutnya.

Sebelum diadakannya kegiatan siskamling kondisi keamanan Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diwarnai dengan banyaknya kejahatan salah satunya dengan kejadian pencurian kendaraan sepeda motor warga serta penjambrentan, maka dari itu pemerintah Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung mengadakan kegiatan siskamling secara bergiliran sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan stabil bagi warga Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

2. Program penanggulangan kemiskinan saat pandemi Covid19 yang dibuat oleh Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung sangat mendukung baik dalam pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dalam sektor pertanian. Pendapatan nagari merupakan jumlah keseluruhan penerimaan nagari yang dibukukan dalam APBDs setiap tahun anggaran.

Bahwa sumber pendapatan nagari meliputi:

- a. Sumber Pendapatan Nagari
 1. Dana nagari
 2. Alokasi dana nagari
 3. Pendapatan asli nagari terdiri dari hasil kekayaan nagari dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah
 4. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk nagari dan dari hasil retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi nagari yang merupakan pembagian untuk setiap nagari secara proporsional
 5. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk nagari paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap nagari secara proporsional yang merupakan alokasi dana nagari
 6. Bantuan keuangan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b. Bantuan keuangan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang disalurkan melalui kasnagara
- c. Sumber pendapatan nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh nagari dan tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah

Adapun sumber kekayaan nagari terdiri dari :

- a. Tanah kasnagari
- b. Bangunan nagari yang dikelola nagari
- c. Lain-lain kekayaan milik nagari

Pembangunan masyarakat nagari diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap berkelanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri.

Program penanggulangan kemiskinan saat pandemi Covid19 yang dibuat oleh Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah :

a. Program meningkatkan perlindungan sosial

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Bahwa arah kebijakan pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya.

Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan kebijakan ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan.

b. Program meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Arah kebijakan kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (humancapital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari

keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

c. Program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

Arah kebijakan ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan.

Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial. Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat.

Sebagai penjabaran program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, maka disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- 4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengkonsolidasikan program-program penanggulangan kemiskinan menjadi 3 (tiga) kelompok/klaster program penanggulangan

kemiskinan. Masing-masing ketiga kelompok tersebut secara berurutan berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, selanjutnya berupaya meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, dan kemudian meningkatkan tabungan serta menjamin keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro dan kecil.

Kelompok-kelompok program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Program Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial Program-program yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - b. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
 - c. Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)
 - d. Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM)
- 2) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Program yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
- 3) Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Program yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 4) Kelompok program pro-rakyat lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan Yang termasuk dalam kelompok ini adalah program-program lain diluar ketiga kelompok sebelumnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, setiap kelompok tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda yang berhubungan erat dengan cakupan kegiatan dan penerima manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan.

- d. Program pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan

terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlunya diciptakan iklim usaha yang kondusif dimana stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan.

Program pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian.

Selanjutnya uraian dari jenis – jenis bantuan yang diberikan kepada msyarakat miskin pada masa pandemi Covid19 pada tahun 2019.

- 1) Program keluarga harapan (PKH) Yang menerima bantuan ini sebanyak 225 jiwa yang mana perkepala keluarga menerima uang sejumlah 300 ribu perbulan dan bantuan ini belaku hingga saat ini.
- 2) Bantuan dalam bentuk sembako (BPNT) Yang menerima bantuan ini sebanyak 400 jiwa yang jika dinominalkan bantuan sembako ini berjumlah 200 ribu yang di terima perkepala keluarga perbulannya dan bantuan ini masih berlaku hingga saat ini.
- 3) Beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) Yang menerima bantuan ini sebanyak 435 jiwa , perkepala keluarganya menerima 10 kg beras perbulan dan masih berlaku hingga saat ini.
- 4) Bantuan langsung tunai yg menggunakan dana desa/ Nagari (BLT Desa) Yang menerima bantuan ini sebanyak 420 jiwa, perkelapa keluarga menerima sebanyak 900 ribu selama 3 bulan
- 5) Bantuan langsung tunai dari kabupaten (BLT Kabupaten) Yang menerima bantuan ini sebanyak 315 jiwa , perkepala keluarga menerima 900 ribu selama 3bulan.
- 6) Bantuan langsung tunai dari provinsi (BLT Provinsi) Yang menerima bantuan ini sebanyak 250 jiwa dengan nominal 900 ribu perkepala keluarga selama 3 bulan.

- 7) Bantuan sosial (Bansos) Yang mana bansos ini diberikan langsung dari Dinas Sosial melalui PT. Pos yang berkerjasama dengan pihak Nagari. Jumlah penerima bantuan ini sebanyak 530 jiwa dengan nominal 600 ribu selama 3 bulan dan ada yang masih menerima hingga saat ini tentunya dengan penyesuaian data dari nagari

Jumlah penerima bantuan keseluruhannya dari PKH, BPNT, RASKIN, BLT Desa, BLT Kabupaten, BLT Provinsi, dan BANSOS sebanyak 2575 jiwa.

Kriteria penerima bantuan untuk masyarakat miskin di nagari kunpar yaitu:

- 1) Tercatat sebagai warga nagari Kunpar.
- 2) Tidak terdaftar dalam jenis bantuan lain dari pemerintah ataupun daerah lain.
- 3) Rumah dengan lantai kasar (belum diplaster)
- 4) Dinding rumah terbuat dari papan.
- 5) Tidak memiliki tanah dan lahan perkebunan.
- 6) Berpenghasilan dibawah 1,5 juta perbulan.
- 7) Janda/miskin
- 8) Duda tua/miskin
- 9) Jompo /miskin

Inilah kriteria penerima bantuan di nagari kunpar yang mana kriteria ini dikeluarkan dari hasil musyawarah Wali nagari beserta jajaran dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak timbul cemburu sosial di masyarakat karena hal ini sangat sensitif dalam masyarakat.

Peran Wali Nagari dalam menanggulangi kemiskinan saat pandemi Covid19 di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

Peran Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dalam menanggulangi kemiskinan saat pandemi Covid19 adalah sebagai publik regulator dapat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi melalui :

1. Pengaturan terhadap akses sumber daya alam

Bahwa Sumberdaya alam merupakan salah satu bentuk milik kekayaan alam suatu negara. Kekayaan alam hayati ini merupakan salah satu tumpuan hidup masyarakat Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dan untuk memperolehnya sumberdaya alam ini perlu adanya beberapa akses atau peluang yang harus dijalankan.

2. Pengaturan terhadap akses permodalan

Akses permodalan yang mudah dan cepat akan mendorong pertumbuhan

jumlah pengusaha pemula. Akses permodalan ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak bank yang terdapat di kanagarian Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung.

3. Pengaturan terhadap akses peluang pasar bagi pemasaran hasil usahamasyarakat.

Pengaturan terhadap akses peluang pasar bagi pemasaran hasil usaha masyarakat merupakan proses penyiapan swadaya masyarakat ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajiban dalam pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri serta mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengaturan terhadap akses peluang pasar bagi pemasaran hasil usaha masyarakat dapat dimanfaatkan oleh para petani ternak terutama petan ternak dalam skala kecil. Disamping itu teknologi dan keterampilan usaha merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.

Selanjutnya peranan Walinagari dalam penanganan kemiskinan dinagari Kunpar pada masa pandemi Covid19 di uraikan sebagai berikut:

- 1) Mengintruksikan jajarannya beserta Tokoh masyarakat memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menerima dan tidak menerima bantuan agar tidak terjadinya cemburu sosial di tengah masyarakat.
- 2) Mengintruksikan jajarannya agar melakukan pendataan langsung ke masyarakat saat memberikan bantuan dengan data yang rill sebagai calon penerimabantuan.
- 3) Melakukan pengawasan kepada jajarannya agar memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat saat memberikan bantuan.
- 4) Melakukan pengawasan dan memastikan bantuan diterimamasyaakat.
- 5) Melakukan pengawasan dan memastikan tidak terjadi pungli pada penerima bantuan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah:
 - a. Sebagai Pelaksana Kebijakan

- b. Sebagai Pelaksana Program-Program
 - c. Sebagai Pembina
2. Program penanggulangan kemiskinan saat pandemi Covid19 yang dibuat oleh Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung diantaranya adalah :
 - a. Program meningkatkan perlindungan sosial
 - b. Program meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
 - c. Program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
 - d. Program pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
3. Peran Wali Nagari di Nagari Kunangan Parik Rantang Kabupaten Sijunjung dalam menanggulangi kemiskinan saat pandemi Covid19 adalah sebagai publik regulator dapat yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi melalui:
 - a. Pengaturan terhadap akses sumber daya alam
 - b. Pengaturan terhadap akses permodalan
 - c. Pengaturan terhadap akses peluang pasar bagi pemasaran hasil usaha masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pemerintah nagari, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui sertifikasi sehingga dengan demikian lembaga ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien dan bereperan lebih optimal.
2. Penanganan kemiskinan hendaknya benar-benar bersentuhan dengan masyarakat miskin, memberikan bantuan sesuai sasaran yaitu by name, by adress. Data harus by name by adress, masalah pendataan harus terinci.
3. Hendaknya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat terdistribusikan.

REFERENSI

Arimbi. 2013. *Pengertian Peran*. Edisi Ke-2. Cetakan Ke-13. BPFE. Yogyakarta.

- Navis. 2012. *Nagari Sebagai Suatu Pemukiman*. Yogyakarta: STIEYKPN.
- Amir Sutan. 2008. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Azhari, Ichwan. 2012. *Analisis Kemiskinan di Pedesaan Sumatra Utara*. Dalam Harian Mimbar Umum 24 Januari 2012. Medan.
- Ismail, Zarmawis. 2009. *Masalah Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan: Kasus Yogyakarta dan Surabaya*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan. LIPI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- LKAAM. 2012. *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB)
- Mohtar Mas'ood. 2013. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexi. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ralph Linton. 2012. *Pengertian Peranan*. Putra Abardin. Jakarta
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. [http:// www.jurnalekonomirakyat.com](http://www.jurnalekonomirakyat.com)
- Salim, Emil. 2014. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES.
- Santosa. 2013. *Dimensi Peranan*. Surabaya: Karya Abditama
- Soekamto. 2012. *Aspek-Aspek Peranan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soeroto. 2005. *Pengertian Nagari. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM
- Soemarno dan Dardjosumardjono. 2003. *Sistem Pemerintahan Nagari dalam Tinjauan Filosofis Budaya Minangkabau*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Tibyan. 2015. *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Toha. 2013. *Pengertian Peranan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Turmen E. Kast dan James E. Rosenzswerg (2007). *Konsep Peranan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari